

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

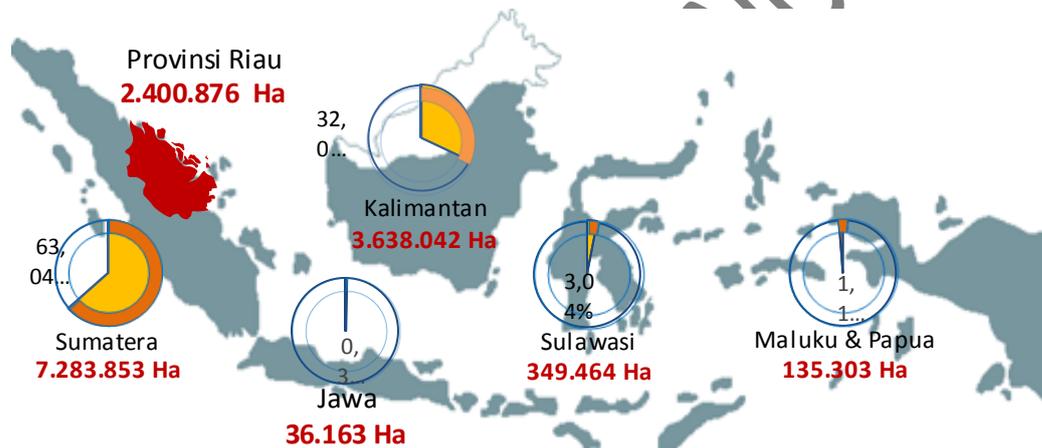
Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan nasional yang paling pesat berkembang dalam dua dekade terakhir. Sejak tahun 2008 Indonesia menjadi negara produsen dan pengeksport *Crude Palm Oil (CPO)* terbesar di dunia dengan total produksi mencapai 33,5 juta ton, setara dengan 53 persen kebutuhan *CPO* global (FAO, 2014; Feintrenie et al., 2010; Gatto et al., 2015). Mencermati tren perkembangan industri kelapa sawit sejak tahun 1970, didapati bahwa pertumbuhan rata-rata produksi kelapa sawit nasional mencapai sebelas persen per tahun dengan laju ekspansi sepuluh persen, dan total luas kebun hingga 12 juta ha (Ditjenbun, 2017).

Perkembangan industri kelapa sawit yang berlangsung sangat cepat, tidak terlepas dari tingginya permintaan *CPO* global. Kebutuhan *CPO* global diperkirakan mencapai 78 juta ton pada tahun 2020 (Suharto et al., 2015), sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dunia. Selain itu tingginya permintaan *CPO* disebabkan adanya kebijakan *mandatory biofuel* di beberapa negara khususnya di Eropa. Susanti (2016) mengutarakan *biofuel* menjadi andalan dunia dalam mengatasi krisis energi, sementara Indonesia termasuk salah satu negara yang menghadapi krisis energi yang tergolong parah (Arifin Panigoro, 2015).

Secara spasial, perkebunan kelapa sawit nasional hanya terkonsentrasi di pulau Sumatera dan Kalimantan. Sementara perkebunan kelapa sawit terluas terdapat di Provinsi Riau. Syahza (2013) menyatakan dalam periode 2001-2011 pertumbuhan perkebunan kelapa sawit Riau mencapai delapan persen per tahun. Hingga tahun 2015 luas total perkebunan kelapa sawit Riau telah lebih dari 2,4 juta ha atau lebih dari 21 persen luas total perkebunan kelapa sawit nasional, dengan total produksi *CPO* mencapai delapan juta ton per tahun (Ditjenbun, 2017).

Perkembangan industri kelapa sawit di Provinsi Riau telah berkontribusi besar terhadap pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi daerah. Meski

masih mengandalkan industri primer dengan keunggulan komparatif, yaitu berbasis pada sumber daya alam (SDA) dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berlimpah (Ananda, 2017), industri kelapa sawit Riau telah mendorong berkembangnya daerah baru (*remote*) berbasis perkebunan kelapa sawit dengan segala aktivitas pendukungnya. Karena berkembang sangat progresif, Pemerintah menjadikan industri kelapa sawit sebagai *leading industry* di Provinsi Riau, dengan fokus kebijakan pembangunan yang mengarah pada pengembangan industri hilir untuk mengoptimalkan nilai tambah dan daya saing kelapa sawit. Industri kelapa sawit Riau dipersiapkan untuk memiliki keunggulan kompetitif dan kolaboratif, yaitu pola pembangunan multi sektor terintegrasi yang dikemas dalam satu rencana strategis jangka panjang (Stimson & Stough, 2008).



Sumber: Penyusun, 2018 (Olahan Data Ditjenbun, 2017)

GAMBAR 1.1
SEBARAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA

Meski unggul mamajukan perekonomian wilayah, eksistensi industri kelapa sawit tidak sepenuhnya diterima baik oleh semua pihak. Tudingan negatif terkait ekspansi perkebunan kelapa sawit terus menjadi perdebatan, karena dianggap *unsustainable*. Puncak dari kecaman terhadap industri kelapa sawit yang dijustifikasi sebagai penyebab kerusakan lingkungan dan permasalahan sosial, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015, tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, yang intinya adalah moratorium pengembangan

perkebunan kelapa sawit untuk jangka waktu tertentu sambil melakukan upaya perbaikan tata kelola perkebunan nasional (Waluyo et al., 2016).

Pelaksanaan tata kelola industri kelapa sawit berkelanjutan melibatkan banyak pemangku kepentingan, yaitu semua komponen atau elemen baik individu atau kelompok yang secara aktif maupun pasif memberikan pengaruh atau bahkan terpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan (Freeman & Reed, 1983; Kessler et al., 2017; Salma, D & Pesqueux, 2005). Tiap pemangku kepentingan seyogyanya menjalankan peran sesuai fungsinya, sehingga secara sistem, tata kelola berjalan optimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Iqbal (2007) menyatakan “peran” menjadi satu media dalam mencapai tujuan bersama, dimana pemangku kepentingan harus mampu memformulasikan dan mengimplementasikan aksi bersama. Suhardono (1994) menjelaskan peran (*role*) sebagai perilaku yang harus dilakukan sesuai jabatan tertentu. Peran juga dimaknai sebagai tindakan yang diharapkan sesuai status tertentu (Mahfud et al., 2014). Peran pemangku kepentingan merupakan aspek dinamis terkait pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai kedudukan, sehingga terdapat peran normatif (kewajiban tertulis) dan peran ideal yang bersifat improvisasi (Soekanto, 2002).

Permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit Riau tidak terlepas dari “persoalan peran” masing-masing pemangku kepentingan yang menyebabkan terjadinya disfungsi peran sehingga berdampak luas terhadap tata kelola industri kelapa sawit secara menyeluruh. Dalam ilmu sosiologi menurut beberapa ahli, persoalan peran baik secara personal maupun organisasi dapat meliputi, *role conflict* (Biddle, 1986; Cohen, 1992; Suhardono, 1994), *role taking* dan *role consensus* (Biddle, 1986), *role ambygu* (Rebele, 1990 dalam Agustina, 2009), *role overload* (Abraham, 1997 dalam Agustina, 2009), *role set* dan *role strain* (Cohen, 1992).

Selain persoalan peran, Aikanathan et al. (2014) menjelaskan bahwa untuk mewujudkan *sustainable palm oil production*, dibutuhkan persepsi yang sejalan antara pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan. Kesamaan persepsi pemangku kepentingan menjadi salah satu faktor penting untuk mengoptimalkan pengelolaan sawit berkelanjutan. Sehingga berdasarkan ulasan diatas dalam upaya

mengoptimalkan tata kelola industri kelapa sawit di Provinsi Riau, diperlukan kajian peran dan persepsi pemangku kepentingan.

1.2. Rumusan Masalah

Luas perkebunan sawit nasional saat ini yang mencapai 11 juta ha, diperkirakan akan terus berkembang seiring peningkatan permintaan *CPO* global. Lonjakan permintaan *CPO* akan mendorong terjadinya ekspansi perkebunan, sementara ketersediaan lahan semakin terbatas. Kondisi tersebut berpotensi memicu berbagai persoalan lingkungan dan sosial seperti alih fungsi lahan, *deforestasi*, menurunnya persediaan pangan hingga pada persoalan *global warming* dan *climate change* (Susanti & Burgers, 2012).

Perkembangan industri kelapa sawit nasional secara umum belum diimbangi dengan pengelolaan yang optimal, hal ini terbukti dengan adanya kebijakan moratorium pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 yang intinya adalah perbaikan tata kelola dalam industri kelapa sawit. Berdasarkan teori yang ada, tidak optimalnya pengelolaan dapat disebabkan persoalan peran yang mengakibatkan terjadinya difungsi peran dan perbedaan persepsi pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan. Misalkan saja soal kebijakan moratorium perkebunan sawit, Firdaus (2017) mengulas pendapat analis *Labour Institute Indonesia* Andy William Sinaga dalam “*Berita benar*” menyatakan bahwa kebijakan moratorium berdampak negatif pada ekonomi makro, karena perkebunan sawit nasional mempekerjakan 4,5 juta orang.

Perbedaan persepsi yang lain adalah menanggapi isu *unsustainability* industri kelapa sawit, salah satunya pada persoalan *deforestasi*. Paspri (2016 dalam Gapki, 2017) menerangkan bahwa perkebunan sawit justru merupakan fenomena *reforestasi* bukan *deforestasi*. Santosa et al. (2016) dalam sebuah riset terkait *deforestasi* Indonesia di wilayah Provinsi Riau menegaskan bahwa hanya kurang dari sembilan persen ekspansi perkebunan sawit Riau yang berada di wilayah Area Peruntukan Kehutanan (APK), selebihnya ekspansi dilakukan dilahan non produktif seperti belukar, lahan pertanian dan sejenisnya, jadi bukan *deforestasi*, karena *deforesrtasi* adalah perubahan fungsi APK menjadi fungsi baru seperti perkebunan, pertanian atau perkotaan, sangat berbeda dengan

generaliasasi penyebutan *deforestasi* yang diisukan negara-negara Eropa, yang tendesius mendeskreditkan industri kelapa sawit nasional (Jati, 2017).

Dalam upaya perbaikan pengelolaan untuk mewujudkan industri kelapa sawit berkelanjutan khususnya di Provinsi Riau, dibutuhkan implementasi peran yang optimal dan kesamaan persepsi terhadap keberlanjutan dari masing-masing pemangku kepentingan. Pengelolaan industri kelapa sawit Provinsi Riau menarik untuk dikaji lebih jauh, khususnya terkait peran dan persepsi pemangku kepentingan. Beberapa pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini (*research question*) adalah:

1. Bagaimanakah perkembangan industri kelapa sawit secara makro dan khususnya di Provinsi Riau?
2. Bagaimanakah implementasi peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan industri kelapa sawit Riau?
3. Bagaimanakah persepsi pemangku kepentingan terhadap industri kelapa sawit berkelanjutan?

1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk **“Mengkaji Persoalan dalam Pengelolaan Industri Kelapa Sawit Riau Terkait Peran dan Persepsi Pemangku Kepentingan untuk Mewujudkan Keberlanjutan”** Dengan demikian diharapkan akan teridentifikasi persoalan dalam pengelolaan yang berkaitan pelaksanaan peran pemangku kepentingan. Serta pemahaman mengenai persepsi pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan industri kelapa sawit Riau.

Untuk mencapai tujuan tersebut sasaran penelitian ini adalah :

1. Mengkaji perkembangan industri kelapa sawit secara makro, khususnya di wilayah Provinsi Riau melalui berbagai sumber informasi, data sekunder maupun data primer;
2. Menganalisa peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan industri kelapa sawit Riau.

3. Menganalisa dan memahami persepsi pemangku kepentingan terhadap industri kelapa sawit berkelanjutan, yang mencakup persepsi terhadap isu *unsustainability*, persepsi terhadap keberlanjutan produksi dan persepsi terhadap capaian keberlanjutan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang penataan ruang, khususnya dalam konteks pengembangan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Karena pengelolaan kelapa sawit Riau dapat dijadikan model bagi daerah yang memiliki potensi komoditas yang sama.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis secara pribadi yang berkerja di pemerintahan khususnya pada bidang Penataan Ruang di Provinsi Riau, dan secara umum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Manfaat praktis yang diharapkan meliputi:

1. Mengetahui lebih jauh perkembangan industri kelapa sawit secara makro dan khususnya di Provinsi Riau yang diperoleh melalui penggalan data dan informasi yang bersumber dari data sekunder maupun data primer.
2. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan terkait khususnya Pemerintah Provinsi Riau dalam mengambil kebijakan pembangunan, serta memperkaya konsep “industri kelapa sawit berkelanjutan”.
3. Hasil kesimpulan dan rekomendasi penelitian dapat menjadi referensi, model atau konsep pembangunan bagi daerah dengan komoditas sejenis.
4. Dalam konteks keilmuan dapat menambah wawasan bidang penataan ruang atau bidang ilmu lainnya yang terkait.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu 1) ruang lingkup spasial dan 2) ruang lingkup substansial. Ruang lingkup spasial merupakan wilayah penelitian secara fisik administratif yang menggambarkan dimana lokasi penelitian dilakukan. Sementara ruang lingkup substansial mencakup hal-hal yang menjadi bagian dari pembahasan dalam penelitian ini.

1.5.1. Ruang Lingkup Spasial

Secara spasial penelitian ini mencakup wilayah Provinsi Riau dengan batas wilayah administrasi yang telah disahkan. Provinsi Riau memiliki luas wilayah sebesar 8.915.016 ha, yang terbentang di sebagian lereng bukit barisan, dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan salah satu wilayah laut dengan lalu lintas pelayaran terpadat di Dunia.

Dalam sistim koordinat spasial Provinsi Riau terletak antara $01^{\circ}05'00''$ Lintang Selatan – $02^{\circ}25'00''$ Lintang Utara atara antara $100^{\circ}00'00''$ Bujur Timur – $105^{\circ}05'00''$ Bujur Timur (BPS, 2016). Batas adminitrasi Provinsi Riau :

1. Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
2. Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat
3. Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
4. Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara



Sumber: Dokumen Rancangan RTRW Provinsi Riau, 2015 (diolah)

GAMBAR 1.2 PETA WILAYAH ADMINISTRASI PROVINSI RIAU

1.5.2. Ruang Lingkup Substansial

Lingkup materi yang dibahas dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan akhir penelitian yaitu “Mengkaji persoalan dalam pengolahan industri kelapa sawit Riau yang terkait peran dan persepsi pemangku kepentingan untuk mewujudkan keberlanjutan”, sehingga perlu dilakukan pembatasan substansi dan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini. Substansi dan materi pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kajian makro perkembangan industri kelapa sawit global, nasional dan secara mikro di provinsi Riau. Mencakup deskripsi dan pemahaman terhadap dinamika perkembangan industri kelapa sawit yang menggambarkan pentingnya industri kelapa sawit, tingkat kebutuhan pasar, skema pengembangan masa mendatang, potensi dan tantangan yang dihadapi industri

kelapa sawit global, nasional dan khususnya di Provinsi Riau sebagai ikon sawit nasional.

2. Melakukan kajian dan analisis peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan industri kelapa sawit di Provinsi Riau. Meliputi identifikasi, pengelompokan dan analisis pemangku kepentingan berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh yang dimiliki. Serta dilanjutkan dengan analisis hubungan antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan industri kelapa sawit Provinsi Riau.
3. Melakukan kajian dan analisis persepsi pemangku kepentingan terhadap *sustainability* industri kelapa sawit Riau. Mencakup 1) persepsi pemangku kepentingan terhadap isu *unsustainability*, 2) persepsi pemangku kepentingan terhadap *sustainable production* dan 3) persepsi pemangku kepentingan terhadap capaian keberlanjutan industri kelapa sawit Riau.
4. Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi mengenai peran dan persepsi pemangku kepentingan dalam pengelolaan komoditas kelapa sawit di Provinsi Riau, sebagai masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan yang terkait untuk mengoptimalkan pengelolaan, dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk mewujudkan industri kelapa sawit berkelanjutan dan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau dimasa mendatang.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan telah mempertimbangkan eksistensi penelitian (khususnya tesis/skripsi) yang pernah dilakukan terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang sama dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL I.1
KEASLIAN PENELITIAN YANG DILAKUKAN

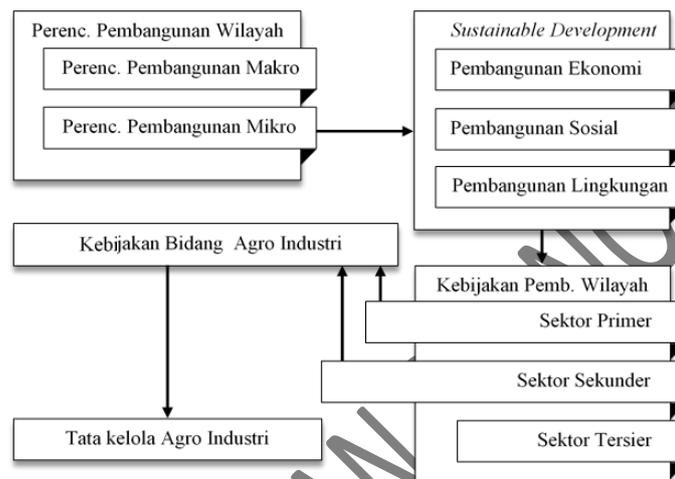
Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
<i>Sustainable Palm Oil: How Does The Indonesian Palm Oil Industry Affect Ecologically, Socially and Economically</i>	1 Untuk mempelajari bagaimana industri kelapa sawit berdampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan terhadap lingkungan di Indonesia.	Kualitatif dengan deskriptif kualitatif	Perkembangan industri kelapa sawit Indonesia memberikan dampak positif dan negatif pada ketiga aspek <i>ekonomi, sosial dan lingkungan</i> . Perkembangan industri kelapa sawit Indonesia secara nyata tidak
Penelitian : Tesis Penulis :	2 Melalui studi ini diharapkan akan		

Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
<p>Mattias Johansson</p> <p>Institusi : <i>Umea University - Swedan</i></p> <p>Tahun : 2008</p>	<p>memberikan masukan kepada Indonesia dalam mewujudkan <i>sustainable palm oil</i></p>		<p>diarahkan pada sistim <i>sustainable development</i>, hal tersebut dapat dilihat dari hasil sertifikasi <i>RSPO</i> yang masih minim. Diharapkan industri kelapa sawit dikelola dengan lebih baik.</p>
<p><i>The Palm Oil Industry From Perspective of Sustainable Development A Case of Study Malaysian Palm Oil Industry</i></p> <p>Penelitian : Tesis</p> <p>Penulis : Suhaila Binti Alang Mahat</p> <p>Institusi : <i>Asia Pasific Studies Ritsumeikan Asia Pasific University Of Japan.</i></p> <p>Tahun : 2012</p>	<p>1 Untuk mengetahui bagaimana pemerintah Malaysia mengatasi dampak negatif yang disebabkan industri kelapa sawit sebagaimana yang di isukan oleh internasional <i>NGOs</i>.</p> <p>2 Untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah telah diimplimentasikan oleh perusahaan dan pelaku idustri kelapa sawit untuk mencapai <i>sustainable development</i>.</p>	<p>Kualitatif dengan deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa negara Malaysia merupakan salah satu negara produsen dan <i>exporter</i> terbesar dunia yang sangat peka terhadap isu lingkungan khususnya dampak industri kelapa sawit. Dalam mewujudkan keseimbangan antar kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan Malaysia menerapkan regulasi berbasis kepekaan pada lingkungan dan keberlanjutan pembangunan seperti <i>RSPO</i> dan <i>National Biofuel Policy</i>.</p>
<p><i>The Oil Palm Plantation Industry In Malaysia: a Study Of Sustainable Management</i></p> <p>Penelitian : Tesis</p> <p>Penulis : Sarala Aikanathan</p> <p>Institusi : University Of Malaya, Faculty of Economics and Administration</p> <p>Tahun : 2013</p>	<p>1 Meninjau ulang kerangka <i>sustainability palm oil</i> dan menerapkannya.</p> <p>2 Meninjau ulang tren persepsi terhadap pengembangan industri kelapa sawit dan mempertimbangkan implikasinya</p> <p>3 Menganalisis hubungan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam industri kelapa sawit</p> <p>4 Untuk mendapatkan variabel kunci dalam membangun standar pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit</p>	<p>Metode Kuantitatif dengan Regresi dan korelasi</p>	<p>Hasil penelitian disimpulkan bahwa masih banyak ditemukan gap persepsi <i>stakeholder</i> terhadap <i>sustainability palm oil</i> di Malaysia, yang disebabkan perbedaan kepentingan <i>stakeholder</i>. Secara umum rekomendasi hasil penelitian adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persepsi sangat mempengaruhi keberhasilan <i>sustainability palm oil</i>, • <i>Sustainability</i> bersifat lokalitas dan tidak bisa digeneralisasi. • Persepsi <i>sustainability</i> terkoneksi dengan variabel yang tak terukur, dan memiliki standar berbeda pada tiap daerah dan grup tertentu.

Sumber: Analisis Penyusun, 2018

1.7. Posisi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah. Pembangunan wilayah merupakan integrasi antara pembangunan mikro wilayah dan pembangunan makro yang terakumulasi dalam satu kerangka *sustainable development*. Dimana dalam implementasinya membutuhkan kebijakan wilayah yang berkaitan dengan tata kelola yang melingkupi tiga sektor 1) primer, 2) sekunder dan 3) tersier

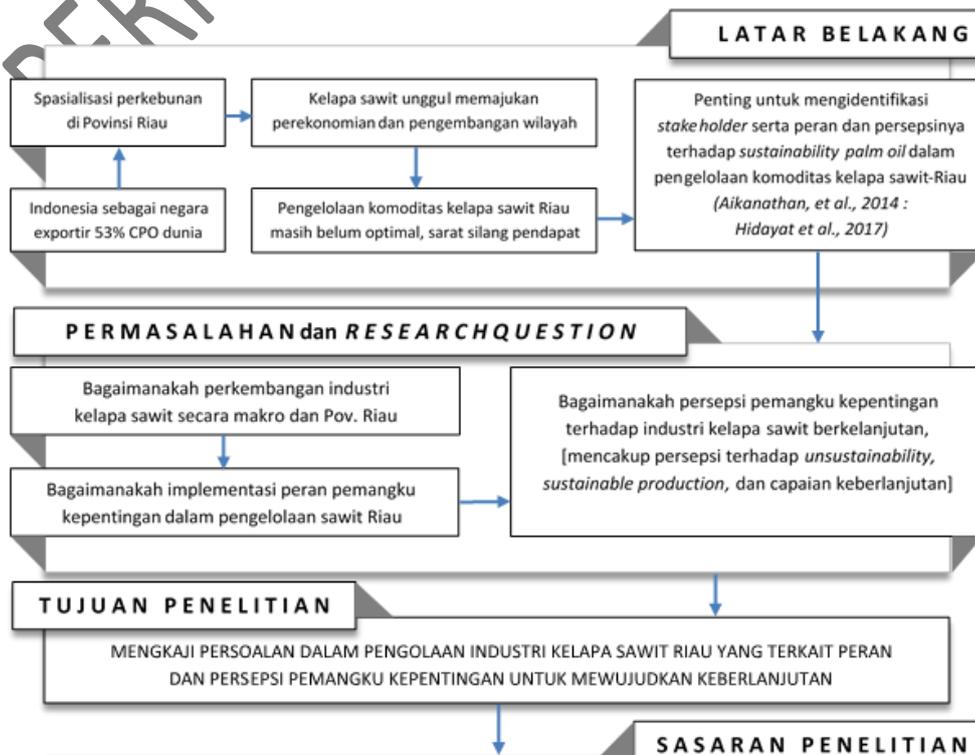


Sumber: Analisis Penyusun, 2018

GAMBAR 1.3
DIAGRAM POSISI PENELITIAN DALAM BIDANG ILMU
PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH

1.8. Kerangka Pemikiran

Secara sistematis kerangka pemikiran untuk mencapai tujuan akhir penelitian ini digambarkan melalui diagram berikut:



Sumber: Analisis Penyusun, 2018

GAMBAR 1.4

DIAGRAM KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN

1.9. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yaitu mengeksplorasi beberapa sistem terbatas melalui pengumpulan data secara detail dan mendalam melibatkan berbagai sumber informasi majemuk, seperti pengamatan, wawancara, dokumen dan data lainnya yang kemudian dideskripsikan (Creswell, 2014). Dalam proses penelitian ini keragaman informasi dari perspektif informan menjadi masukan yang akan diakumulasi dan interpretasi untuk menjawab tujuan penelitian (Creswell, 2014). Metode kualitatif juga digunakan untuk mengeksplorasi dan memahai suatu persoalan yang berhubungan fenomena sosial, atau dalam usaha mengurai kompleksitas suatu persoalan melalui cara pandang induktif dari tema khusus ke tema yang lebih umum (Creswell, 2014; Sugiyono, 2013).

Metode kualitatif yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang berupaya menggambarkan suatu fenomena secara jelas terkait bagaimana keberlangsungan industri kelapa sawit, bagaimana peran yang dijalankan dan yang belum dijalankan serta bagaimana persepsi pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan industri kelapa sawit Riau. Dengan metode ini, diharapkan tujuan penelitian dapat tercapai, yaitu mengkaji persoalan dalam pengelolaan industri kelapa sawit yang terkait peran dan persepsi pemangku kepentingan untuk mewujudkan keberlanjutan di Provinsi Riau.

1.9.1. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui proses wawancara dan diskusi mendalam (*indepth interview*) kepada informan kunci yang dinilai berkapasitas untuk memberikan informasi yang sekaligus dapat mewakili pemangku kepentingan pengelolaan industri kelapa sawit. Sementara data sekunder dihimpun melalui telaah dokumen instansional seperti dokumen perencanaan, laporan penelitian, regulasi dan peraturan perundangan, jurnal penelitian terkait sawit, buku-buku, informasi dari media elektronik, surat kabar serta sumber tertulis lain yang relevan, serta dapat dipergunakan untuk memperkaya hasil analisis penelitian. Secara lebih detail kebutuhan data disajikan pada tabel berikut:

TABEL I.2
KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI PENELITIAN

No.	Sasaran Penelitian	Kebutuhan Data dan Informasi (Datim)	Jenis Datim	Teknik Puldatim	Sumber Data dan informasi
1.	Memahami perkembangan industri kelapa sawit	Perkembangan industri kelapa sawit global dan Indonesia	Sekunder	Telaah dokumen	Jurnal, artikel dan media informasi terkait perkembangan industri kelapa sawit
		Statistik perkebunan Indonesia (perkembangan industri kelapa sawit nasional)	Sekunder	Telaah dokumen	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
		Arah kebijakan pembangunan Provinsi Riau (RTRW Provinsi Riau)	Sekunder	Telaah dokumen	Peraturan perundangan, Bappeda
		Rencana Strategis pengembangan perkebunan, industri dan perdagangan kelapa sawit Provinsi Riau (Rencana Strategis)	Sekunder	Telaah dokumen	Dinas TPH-Bun, Dinas LHK, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Bappeda, Bappeda
		Data Spasial perkebunan kelapa sawit Riau	Sekunder	Telaah dokumen	Bappeda, TPH-Bun.
		Arah Kebijakan Perkebunan kelapa sawit dan gambaran pengelolaan komoditas kelapa sawit	Primer	Wawancara	Dinas TPH-Bun, Dinas LHK, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Bappeda, Bappeda dan BPN, NGO dan Akademisi
		Gambaran persoalan dan tantangan dalam pengelolaan kelapa komoditas kelapa sawit	Primer	Wawancara	Dinas TPH-Bun, Dinas LHK, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Bappeda, Bappeda dan BPN, NGO dan Akademisi
		Informasi penyelenggaraan <i>ISPO</i> dan <i>RSPO</i> di Provinsi Riau, (pencapaian, kendala dan harapan)	Primer	Wawancara	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

No.	Sasaran Penelitian	Kebutuhan Data dan Informasi (Datim)	Jenis Datim	Teknik Puldatim	Sumber Data dan informasi
		Informasi eksistensi kelapa sawit Riau dari sudut pandang Ekonomi, Sosial dan Lingkungan (sisi negatif dan positif)	Primer dan sekunder	Wawancara dan Telaah dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • Informan dari Instansi terkait • Jurnal Penelitian, artikel, publikasi, buku dan sumber lain terkait isu ekonomi, sosial dan lingkungan industri kelapa sawit Riau
3.	Menganalisis peran <i>stakeholder</i> terhadap Pengelolaan komoditas kelapa sawit-Riau.	Tupoksi/profil lembaga/ rencana stretegis/ rencana kerja lembaga.	Primer dan sekunder	Wawancara dan telaah dokumen	Dinas TPH-Bun, Dinas LHK, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Bappenda, Bappeda dan BPN, <i>NGO</i> dan Akademisi
	Identifikasi <i>Stakeholder</i> pengelola komoditas kelapa sawit	<p><i>Stakeholder</i> yang berperan dalam pengelolaan komoditas kelapa sawit dengan klasifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Stakeholder</i> utama - <i>Stakeholder</i> penunjang - <i>Stakeholder</i> Inti 	Primer dan sekunder	Telaah dokumen dan wawancara, serta teknik <i>snowball</i> dalam penentuan <i>stakeholder</i> yang terkait.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu • Dinas TPH-Bun, Dinas LHK, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Bappenda, Bappeda dan BPN, <i>NGO</i> dan Akademisi
4.	Menganalisis persepsi <i>stakeholder</i> terhadap <i>Sustainability palm oil</i> dalam pengelolaan komoditas sawit di Provinsi Riau	<p>Isu krusial <i>unsustainability palm oil</i></p> <hr/> <p>Persepsi <i>stakeholder</i> terkait isu <i>unsustainability palm oil</i>.</p> <hr/> <p>Data informasi opini <i>stakeholder</i> terkait tingkat <i>sustainability palm oil</i> di Provinsi Riau</p>	<p>Sekunder</p> <hr/> <p>Primer</p> <hr/> <p>Primer</p>	<p>Telaah dokumen dan kajian literatur</p> <hr/> <p>Wawancara</p> <hr/> <p>Wawancara</p>	<p>Jurnal penelitian terkait <i>sustainability palm oil</i> dan isu krusial <i>unsustainability palm oil</i></p> <hr/> <p><i>Stakeholder</i> terkait</p> <hr/> <p><i>Stakeholder</i> terkait</p>

Sumber: Analisis Penyusun, 2018

1.9.2. Metode Sampling

Penentuan informan kunci dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu memilih sumber informasi yang dianggap paling memahami dan mengetahui banyak informasi mengenai topik yang dibahas, sementara teknik sampling yang digunakan adalah *maximum variation* dan *snowball sampling*. *Maximum variation* merupakan proses menentukan beberapa orang sebagai informan kunci (*key informan*) untuk menggali informasi secara mendalam.

Sementara proses identifikasi *key informan* dilakukan dengan cara berdiskusi dengan salah satu pemangku kepentingan pertama, sebagai pembuka jalan bagi proses *snowball sampling*, selanjutnya bergulir berdasarkan informasi yang diterima dan berlangsung sesuai dengan kebutuhan. Sementara jumlah pemangku kepentingan atau *key informan* dalam penelitian ini bersifat fleksibel, sampai informasi yang diperoleh dianggap jenuh dan dinilai telah dapat menjawab tujuan penelitian.

1.9.3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam menganalisis data kualitatif sebagaimana yang dibahas secara rinci oleh Afrizal (2016), beliau mengemukakan tiga pendapat ahli dalam menganalisis data kualitatif, berdasarkan pendapat Miles dan Huberman (1992), Spradley (1997) dan Yin (1996). Dari ketiga pendapat tersebut dikompilasi menjadi serangkaian tahapan yang dapat dilakukan dalam menganalisa data kualitatif, yang juga akan diterapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Langkah Pertama

Menyediakan catatan lapangan yang detail dan lengkap hasil *indepth interview* atau observasi, verbatim atau dokumen. Terhadap seluruh dokumen dilakukan *review* secara cepat dan menyeluruh agar mendapatkan kesan tentang isi keseluruhan dokumen hasil penelitian sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Setelah mendapatkan gambaran utuh hasil penelitian secara komprehensif baru secara perlahan data dan informasi yang diperoleh dipelajari secara teliti satu-persatu, untuk menemukan kata-kata penting, simbol-simbol, argumen atau kejadian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, atau ditemukan hal-hal

yang secara berulang-ulang muncul jadi perbincangan. Proses dilanjutkan dengan memberikan tanda pada kata-kata penting, argumen dan lainnya yang ditemukan. Tanda atau simbol dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menggaris bawah, stabilo dan sebagainya. Dalam beberapa pendapat kodifikasi dapat juga dilakukan dengan model berikut :

(AB/IN/10-03-2015/70-75), dimana:

AB = Inisial atau singkatan nama subjek penelitian

IN = Sumber Informan/ lembaga/ instansi dll.

10-03-2015 = tanggal wawancara dilakukan

70-75 = lokasi baris dalam verbatim (baris ke 70 hingga 75)

2. Langkah kedua

Proses selanjutnya adalah menginterpretasi hal-hal yang diperoleh dilapangan dan telah dilakukan proses simbolisasi, cara menginterpretasi dapat dilakukan dengan memberikan catatan disamping atau disekitar penggalan tiap-tiap data. Interpretasi merupakan kesimpulan atas tema-tema yang ditemukan dilapangan. Lalu dilanjutkan dengan membuat klasifikasi dari masing-masing interpretasi data yang telah dibuat, Afrizal (2016) menjelaskan bahwa dalam toeri Huberman (1992) proses ini disebut pengkatagorisasian, sementara Spradley (1997) menyebutnya analisis domain. Klasifikasi tersebut dilanjutkan ke sub klasifikasi (analisis taksonomik) atau dikenel dengan istilah pencarian detail. Proses klasifikasi dilakukan berkesinambungan terhadap seluruh data. Misalnya setelah membaca topik yang lain ternyata ada data yang bisa dimasukkan kedalam klasifikasi dan sub klasifikasi sebelumnya, maka tetap dikumpulkan pada klasifikasi yang sama. Pembuatan klasifikasi dan sub klasifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan matrik.

3. Langkah Ketiga

Setelah menemukan temuan-temuan yang relevan dalam penelitan dilapangan lanjutkan ketahapan penyajian data. Afrizal (2016) menjelaskan pendapat Miles dan Hubermen (1992) dan Spradley (1997) dianjurkan penyajian data dilakukan dengan menggunakan diagram bukan narasi. Setelah pembuatan klasifikasi hubungkan klasifikiasi tersebut antara satu dan lainnya untuk

membentuk pengelompokan dan disajikan dalam bentuk matrik. Dengan demikian akan diperoleh semacam hubungan antar tema-tema atau klasifikasi.

4. Langkah Keempat

Setelah melakukan akumulasi, kompilasi dan analisis data, selanjutnya peneliti mulai membangun asumsi-asumsi atau hipotesis kerja mengenai dinamika kejadian atau fenomena atau hubungan kategori-kategori.

5. Langkah Kelima

Langkah selanjutnya adalah pengujian keabsahan terhadap asumsi-asumsi atau pengkategorisasi yang telah dibangun berdasarkan pada data dan informasi yang dikumpulkan selama penelitian, baik dengan cara *indepth interview* maupun observasi. Tahap lima ini juga dikenal dengan istilah validasi data, Validasi data kualitatif merupakan upaya pemeriksaan akurasi hasil penelitian baik dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca umum. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa siklus proses ini dapat terjadi pengulangan (*feedback*). Misalkan saja setelah tahap lima ini, peneliti dapat kembali melakukan pengujian iterpretasi ke tahap satu dan membangun hipotesis dan selanjutnya ke tahap empat dan/atau seterusnya hingga diyakini bahwa data yang diperoleh sudah cukup valid untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan untuk menjawab sasaran penelitian sebagai berikut.

1. Mengkaji Perkembangan dan Eksistensi Industri Kelapa Sawit Secara Makro, Khususnya di Provinsi Riau

Pemahaman komprehensif perkembangan industri kelapa sawit dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi penting terkait perkembangan industri kelapa sawit global, nasional dan di provinsi Riau melalui berbagai sumber informasi baik data sekunder maupun data primer. Pemahaman dinamika industri kelapa sawit global dan nasional akan disusun dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan, termasuk kajian potensi dan ancaman yang dihadapi industri kelapa sawit nasional.

Sementara dalam pembahasan dinamika industri kelapa sawit Provinsi Riau dilakukan untuk memperoleh gambaran perkembangan industri kelapa sawit Riau dalam konstelasi industri kelapa sawit nasional dan global. Termasuk pemahaman eksistensi industri kelapa sawit Riau dalam pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian diharapkan penelitian ini akan lebih subjektif dalam melakukan analisis persepsi pemangku kepentingan terhadap *sustainability* industri kelapa sawit di Provinsi Riau, tidak terjebak pada isu sektoral baik lingkungan, sosial maupun ekonomi. Dengan demikian penarikan kesimpulan mengenai persoalan prean dalam pengelolaan dan persepsi terhadap *sustainability* industri kelapa sawit Riau akan lebih terbuka dan berimbang.

2. Mengkaji Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Industri Kelapa Sawit

Dalam mengkaji peran pemangku kepentingan dilakukan dengan tahapan 1) identifikasi pemangku kepentingan, (2) pengelompokan pemangku kepentingan, (3) hubungan antara pemangku kepentingan.

2.1. Identifikasi Pemangku Kepentingan

Dalam proses identifikasi pemangku kepentingan, pada tahap awal dilakukan melalui studi literatur dari berbagai sumber informasi untuk mengetahui gambaran secara umum pemangku kepentingan dalam pengelolaan sawit. Reed et al. (2009) mengemukakan bahwa proses identifikasi pemangku kepentingan dapat dilakukan dalam tiga cara yaitu *Focus Group Discussion (FGD)*, wawancara semi terstruktur, atau dengan cara *snowball sampling*. Dalam penelitian ini secara praktis penentuan pemangku kepentingan pengelola komoditas kelapa sawit dilakukan dengan dua cara yaitu *snowball sampling* dan wawancara semi terstruktur. Dalam identifikasi pemangku kepentingan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu, pemahaman terhadap pemangku kepentingan dan keterkaitan pemangku kepentingan sebagai bentuk partisipasi dalam organisasi (Crosby, 1991).

Dalam proses identifikasi ini, pemangku kepentingan akan dibagi menjadi menjadi tiga kelompok, pemangku kepentingan kunci, utama dan penunjang Crosby (1991). Pada masing-masing pemangku kepentingan teridentifikasi akan dideskripsikan peran yang telah diimplementasikan dan potensi difungsi peran berdasarkan hasil wawancara mendalam bersama informan kunci. Pada akhir bagian ini akan diakumulasi secara menyeluruh hasil analisis peran pemangku kepentingan agar terdeskripsikan lebih jelas sebagai masukan tahapan pengelompokan pemangku kepentingan.

2.2. Pengelompokan Pemangku Kepentingan

Langkah selanjutnya adalah memahami peran masing-masing pemangku kepentingan dengan cara mengelompokkan pemangku kepentingan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan. Crosby (1991) mengemukakan dua hal penting dalam menganalisis pemangku kepentingan adalah tingkat kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*). Pemangku kepentingan dianalisis menggunakan matriks pengaruh dan kepentingan (*influence and interest matrix*), yang membagi pemangku kepentingan kedalam empat kelompok, yaitu *subject*, *key player*, *contex setter*, dan *crowd* (Reed et al., 2009). Kelompok *subject* merupakan pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh besar namun kepentingannya rendah, *key player* memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi, *contex setter* memiliki kepentingan rendah tetapi pengaruhnya tinggi, dan *crowd* merupakan pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang rendah.

Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam analisis ini dilakukan dengan model kualitatif yang dikuantitatifkan yaitu memberikan penilaian menggunakan variabel dengan skala *likert* yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan interpretasi hasil wawancara mendalam dan temuan di lapangan. De Groot et al. (2006 dalam Reed et al., 2009) menetapkan variabel pengukuran kepentingan meliputi 1) keterlibatan, 2) fungsi produksi, 3) penyedia habitat, 4) fungsi transportasi, dan 5) fungsi informasi. Sementara variabel pengaruh terdiri dari 1) kompensasi, 2) kepribadian, 3) kekuatan, 4) kelayakan dan 5) kekuatan organisasi.

Hasil identifikasi dan akumulasi penilaian pengaruh dan kepentingan masing-masing pemangku kepentingan, akan menghasilkan grafis diagram Pengaruh-Kepentingan (gambar 1.5). Pola interaksi antar masing-masing pemangku kepentingan tersebut juga dapat divisualisasikan dalam bentuk *stakeholder mapping* yang diperoleh dengan aplikasi gephi, 0.9.1.

		Tingkat Kepentingan <i>stakeholder</i>			
		Tidak ada	Hampir tidak penting	Cukup penting	Sangat penting
Tingkat pengaruh <i>Stakeholder</i>	Sangat berpengaruh	C <i>Subject</i>		A <i>Key Player</i>	
	Cukup berpengaruh				
	Hampir tidak berpengaruh	D <i>Crowd</i>		B <i>Context setters</i>	
	Tidak berpengaruh				

Sumber: Reed et al., 2009 (diolah)

GAMBAR 1.5
DIAGRAM PENGARUH-KEPENTINGAN

2.3. Hubungan Antara Pemangku Kepentingan

Langkah lanjutan analisis peran pemangku kepentingan adalah analisis pola hubungan antara pemangku kepentingan. Dalam hal ini digunakan alat analisis *actor linkage matrix*. Hubungan antar pemangku kepentingan dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu hubungan konflik, saling melengkapi (komunikasi dan koordinasi) dan kerja sama (Reed et al., 2009). Hal penting dalam analisis ini adalah deskripsi hubungan antar masing-masing pemangku kepentingan serta potensi konflik yang mungkin terjadi yang menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan keberlanjutan industri kelapa sawit di Provinsi Riau.

3. Memahami dan Menganalisis Persepsi Pemangku Kepentingan Terhadap Keberlanjutan, serta Capaian Keberlanjutan Industri Kelapa Sawit Riau

Untuk mendapatkan gambaran persepsi pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan industri kelapa sawit Riau, analisis persepsi akan

dibagi menjadi tiga kelompok, pertama persepsi pemangku kepentingan terhadap isu *unsustainability* industri kelapa sawit Riau. Kedua persepsi terhadap keberlanjutan produksi berdasarkan teori Aikanathan et al. (2014) dan ketiga persepsi terhadap tingkat capaian *sustainability* industri kelapa sawit Riau hingga saat ini. Analisis persepsi terhadap isu *unsustainability* dilakukan secara deskriptif berdasarkan hasil wawancara yang dikombinasikan dengan kajian literatur.

Sementara analisis persepsi terhadap keberlanjutan produksi dilakukan secara eksploratif melalui proses kompilasi hasil wawancara mendalam yang kemudian di analisis melalui satu proses pemadatan fakta dan interpretasi hasil temuan. Akhir dari analisis ini adalah gambaran persepsi pemangku kepentingan terhadap hal penting yang perlu diantisipasi pada aspek permintaan produk, manajemen dan persepsi pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan, yang divisualisasikan dalam bentuk diagram. Untuk analisis persepsi terhadap capaian keberlanjutan dilakukan dengan mengkompilasi dan akumulasi penilaian dari pemangku kepentingan terhadap capaian keberlanjutan industri kelapa sawit hingga saat ini.

1.9.4. Kerangka Analisis

Kerangka analisis menggambarkan keseluruhan komponen dari tahapan yang akan dilakukan dalam proses analisis data. Kerangka analisis menunjukkan susunan sistematis, mulai dari data yang dibutuhkan, jenis analisis, metode yang digunakan, instrumen analisis, output serta hasil akhir. Kerangka analisis terdiri dari beberapa tahapan sesuai dengan sasaran penelitian guna menjawab tujuan penelitian, secara detail disajikan pada diagram gambar 1.6.

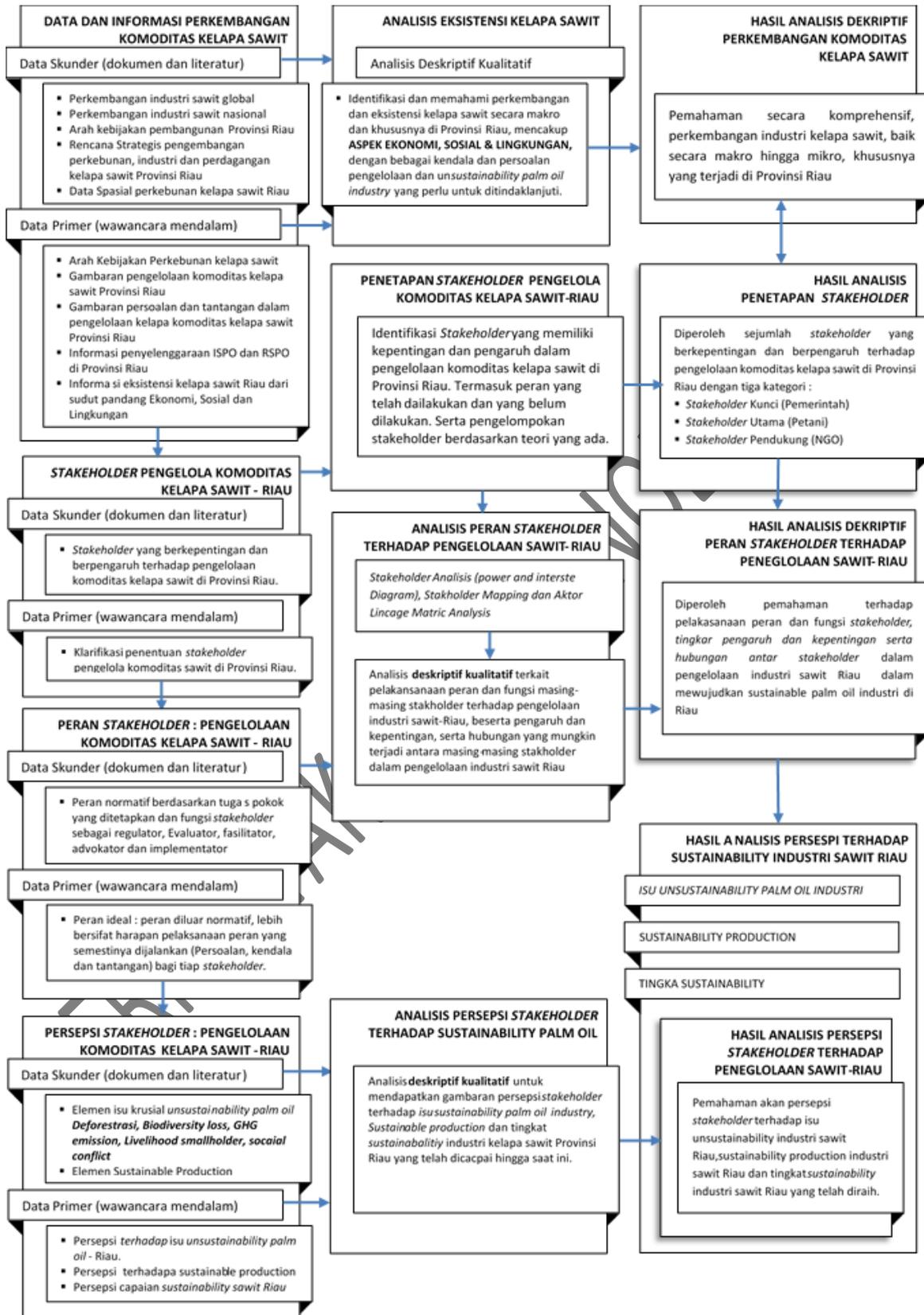
1.10. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dijabarkan dalam lima bab, yang terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, originalitas penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

PERPUSTAKAAN PLANOLOGI



Sumber: Analisis Penyusun, 2018

GAMBAR 1.6
DIAGRAM KERANGKA ANALISIS PENELITIAN

Bab II : Peran dan Persepsi Pemangku Kepentingan Terhadap Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit di Provinsi Riau

Berisikan literatur dan informasi terkait yang dapat meningkatkan pemahaman terhadap mekanisme industri kelapa sawit global dan nasional serta dinamika tata kelola industri sawit yang berlangsung. Pembahasan studi literatur dilakukan dalam beberapa sub pembahasan: 1) Sistem tata kelola agro industri Indonesia, yang menggali pemahaman tata kelola secara umum, tata kelola industri kelapa sawit, sistem kebijakan dan regulasi, mengenai *RSPO* dan *ISPO*. 2) *Sustainable development* dalam teori kewilayahan, yang membahas mengenai teori pengembangan wilayah, teori pembangunan ekonomi daerah dan konsep pembangunan berkelanjutan dan kelapa sawit berkelanjutan. 3) Pemangku kepentingan, peran dan persepsi dalam pengelolaan industri kelapa sawit, membahas teori identifikasi pemangku kepentingan, peran pemangku kepentingan dan persepsi pemangku kepentingan dalam pengelolaan industri kelapa sawit.

Bab III : Tinjauan Umum Provinsi Riau Dalam Konstelasi Industri Kelapa Sawit

Berisikan informasi mengenai: 1) Dinamika industri kelapa sawit global, mendeskripsikan eksistensi dan perkembangan industri kelapa sawit global dan berbagai isu yang muncul terkait pengembangan industri kelapa sawit di belahan dunia. 2) Dinamika industri kelapa sawit nasional, mendeskripsikan perkembangan industri kelapa sawit nasional termasuk potensi dan ancamannya. 3) Dinamika industri kelapa sawit Riau, yang menggambarkan Riau secara umum, eksistensi industri kelapa sawit dalam pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi wilayah di Provinsi Riau.

Bab IV : Analisis Peran dan Persepsi Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Industri Kelapa Sawit di Provinsi Riau

Menyajikan pembahasan mengenai: 1) Analisis peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan industri kelapa sawit Riau, yang diuraikan dalam pembahasan identifikasi pemangku kepentingan,

pengelompokan pemangku kepentingan, serta hubungan antar pemangku kepentingan. 2) Analisis persepsi pemangku kepentingan terhadap *sustainability* industri kelapa sawit di Provinsi Riau, yang membahas mengenai persepsi pemangku kepentingan terhadap isu *unsustainability* industri kelapa sawit Riau; Persepsi pemangku kepentingan terhadap *sustainability production* industri kelapa sawit Riau; Persepsi pemangku kepentingan terhadap capaian *sustainability* industri kelapa sawit Riau.

Pada bab ini juga akan membahas hubungan antara peran dan persepsi pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan sawit dan pengembangan wilayah di Provinsi Riau.

Bab V : Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab ini menyajikan kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian yang dilakukan mengenai peran dan persepsi pemangku kepentingan dalam pengelolaan industri kelapa sawit di Provinsi Riau dalam upaya mewujudkan keberlanjutan industri kelapa sawit dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di Provinsi Riau.